

Counter Hegemoni Alkitab Bahasa Panginyongan

Probo Kusumo

Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, Salatiga, Indonesia
e-mail: pdtchimot@gmail.com

Abstrak

Relasi kuasa menjadi sebuah kenyataan yang selalu ada dalam kehidupan ini. Melalui berbagai macam realitas sosial yang terjadi, banyak bentuk relasi kuasa yang tercipta, salah satunya adalah melalui bahasa. Relasi kuasa yang demikian oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni bahasa. Hegemoni bahasa dapat terjadi di berbagai tempat, tidak terkecuali di dalam kultur kehidupan orang Jawa melalui bahasa Jawa Baku. Bahasa Jawa Baku sebagai sebuah bahasa konstruksi melahirkan adanya bahasa *ngoko* dan *krama* yang lalu memunculkan konsep “kramanisasi” bahasa. “Kramanisasi” inilah yang lalu menjadikan bahasa “ngapak-ngapak” atau Panginyongan menjadi terhegemoni oleh keberadaan bahasa Jawa Baku. Salah satu hal yang dirasakan adalah ketika terjadi proses penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan. Gereja Kristen Jawa (GKJ) sebagai salah satu gereja yang menggunakan bahasa Jawa Baku sebagai bahasa resmi gerejawi terlihat masih terasa berat untuk menjadikan bahasa Panginyongan sebagai bahasa resmi gerejawi. Tulisan ini akan menyoroti sejauh mana peran Alkitab bahasa Panginyongan sebagai saran *Counter Hegemoni* terhadap hegemoni bahasa Jawa Baku di dalam lingkup gereja GKJ yang berada di daerah Banyumasan.

Kata kunci: hegemoni bahasa, bahasa Jawa Baku, kramanisasi, Alkitab Bahasa Panginyongan, *counter* hegemoni.

Counter-hegemony of the Bible in the Panginyongan Language

Abstract

*Power relations are a reality that always exists in this life. Through various social realities that occur, many forms of power relations are created, one of which is through language. Gramsci understood such power relations in terms language hegemony. Language hegemony can occur in various places, including in the culture of Javanese life through Standard Javanese. Standard Javanese, in a process of “language construction,” gave birth to the *ngoko* and *krama* languages which then gave rise to the concept of “kramanization” of language. This “kramanization” is what then made the “ngapak-ngapak” or Panginyongan language become hegemonized by Standard Javanese. The hegemony of Javanese was felt during the process of translating the Bible into Panginyongan language. The Javanese Christian Church (GKJ) as one of the churches that uses Standard Javanese as its official church lan-*

guage still feels it is difficult to make Panginyongan language its official church language. This article will highlight the extent of the role of the Panginyongan language Bible as a suggestion for counter-hegemony against the hegemony of Standard Javanese within the scope of the GKJ church in the Banyumasan area.

Keywords: *language hegemony, standard javanese, kramanization, Panginyongan Language Bible, counter hegemony.*

Pengantar

Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa yang berdiri pada tanggal 17 Februari 1931 di Kota Kebumen adalah sebuah perwujudan dari rasa kebersamaan gereja-gereja Jawa yang dihasilkan oleh badan *zending* (misi) Belanda, terutama oleh *zending* dari gereja-gereja Gereformed Belanda yang melakukan misinya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan.¹ Keberadaan Gereja Kristen Jawa (GKJ) mula-mula tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya komunitas orang Jawa yang telah menjadi Kristen. Berdasarkan catatan Wolterbeek, terdapat komunitas Kristen Jawa yang tersebar di daerah-daerah, yang sekarang disebut dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Komunitas Kristen Jawa di Jawa Tengah bagian selatan pada awalnya bermula dari sembilan orang dari daerah Banyumas yang berprofesi sebagai buruh pabrik yang rela berjalan menuju Semarang hanya untuk menerima tanda sakramen baptis pada tanggal 10 Oktober 1858.² Setelah dibaptis mereka membentuk sebuah komunitas Kristen Jawa di Banyumas dibawah asuhan Ny. Philips van Oostrom, seorang Indo-Belanda yang menjadi pengusaha batik di Kota Banyumas ibukota dari Karesidenan Banyumas.³

¹ S.H. Soekotjo, *Sejarah Gereja-gereja Kristen Jawa (Jilid 1): Di bawah Bayang-bayang Zending 1858-1948* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009), 379.

² J.D. Wolterbeek, *Babad Zending di Tanah Jawa* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1990), 35.

³ *Karesidenan adalah daerah administratif masa pemerintah kolonial Hindia Belanda (dimulai tahun 1830) yang terdiri dari beberapa kabupaten, dimana eks Karesidenan Banyumas sekarang menjadi 4 Kabupaten yaitu: Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara.* Band: Yustina Hastrini Nuwanti dkk., ed., *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas: Masa Gandasubrata tahun 1913-1942* (Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), 17–18. Lihat juga: Ahmad Tohari, “Jejak Tradisi Jawa Kuna Dalam Kebudayaan Jawa Banyumasan,” dalam *Kongres Kebudayaan Jawa II* (Surabaya: Pemprov Jawa Timur, 2018), 140.

Melihat dari dua peristiwa sejarah gereja GKJ, yaitu berdirinya Sinode GKJ di Kota Kebumen sebagai sebuah kesatuan “gereja Jawa” yang didirikan *zending* dari gereja Gereformed Belanda di Jawa Tengah bagian selatan, serta embrionalnya yang dimulai dari baptisan 9 orang pribumi dari daerah Banyumas, menunjukkan gereja GKJ lekat dengan kebudayaan Jawa, terutama kebudayaan Banyumasan. Salah satu wujud kebudayaan tersebut adalah bahasa. Wilayah Banyumasan secara geografis menurut pemetaan di zaman Hindia Belanda adalah yang disebut dengan Karesidenan Banyumas. Model perwilayahan tersebut saat ini sudah dihapus, dan daerah yang saat ini menjadi bagian dari eks Karesidenan Banyumas adalah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Di keempat daerah tersebut berkembang bahasa komunikasi sehari-hari yang dikenal secara luas sebagai bahasa “ngapak-ngapak” atau “banyumasan”. Di luar keempat daerah tersebut, terdapat satu daerah, yaitu Kabupaten Kebumen, yang juga berbahasa “ngapak-ngapak”. Kelima daerah yang berbahasa “ngapak-ngapak” ini juga sering disebut sebagai daerah “Masbarlingcakeb”, akronim dari singkatan 5 nama kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen.

Pada masa kerajaan Mataram (yang saat ini terpecah menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran di Solo; serta Kasultanan dan Pakulaman di Yogyakarta) kelima wilayah ini disebut sebagai wilayah Mancanegaran Kilen, yaitu daerah terluar wilayah kekuasaan Mataram di sebelah barat yang berbatasan dengan kerajaan Sunda. Di kelima daerah inilah yang hingga saat ini bahasa komunikasi sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Banyumasan. Ketika GKJ lahir dan tumbuh di wilayah ini, ternyata bahasa yang dominan dipakai sebagai bahasa gerejawi justru bahasa Jawa yang lebih condong kepada bahasa orang-orang di pusat Keraton (Solo dan Yogyakarta) dengan lebih menekankan gaya bahasa *ngoko-krama*. Gaya bahasa Jawa ini dipakai sebagai bahasa “resmi” orang Jawa, maka muncullah istilah “bahasa Jawa Baku”.

Latar Belakang Masalah

Dialek Jogja-Solo bukan hanya menjadi dialek geografis semata, namun juga menjadi sebuah dialek sosial yang penggunaannya dipengaruhi oleh perbedaan kelompok sosial. Menurut Ben Anderson, hal ini dikatakan sebagai sebuah “feodalisme semu” masyarakat Jawa kolonial (dikatakan terjadi sepanjang tahun 1680-1940).⁴ Dengan demikian, secara sadar atau tidak

⁴ Benedict Anderson, *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), 436.

sadar, sebenarnya telah terjadi sebuah relasi kuasa bahasa di antara penutur bahasa Jawa Baku, khususnya di daerah Banyumasan. Kontruksi bahasa Jawa Baku, yakni bahasa dialek Jogja-Solo dianggap sebagai “Bahasa Jawa dialek standar”,⁵ dianggap sebagai “bahasa Jawa yang benar” dan “bahasa Jawa yang beradab”. Oleh Baryadi Praptomo, hal ini dikatakan sebagai “diskriminasi lingual”.⁶ Konsep *ngoko-krama* juga menerapkan tingkatan bahasa yang meliputi bahasa *ngoko* sebagai bahasa kasar dan bahasa *krama* sebagai bahasa halus, sehingga setiap orang yang merasa dirinya “lebih rendah” harus berbahasa Krama kepada yang “lebih tinggi” dan sebaliknya yang merasa “lebih tinggi” cukup berbahasa *ngoko* kepada mereka yang dinilai kedudukannya “lebih rendah”.

Praktik berbahasa, menurut James Siegel, seharusnya terjalin di antara orang-orang yang tidak saling membawa *cermin* dan tidak saling menyebabkan rasa *rikuh*.⁷ Pada bahasa Jawa Baku, yang terjadi adalah seseorang jika akan berbicara dengan orang lain harus melihat siapa dirinya dan siapa lawan bicaranya. Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, mengatakan bahwa bahasa Banyumas adalah “bahasa” dan bukan hanya sekadar logat atau “dialek” saja.⁸ Hal tersebut disebabkan usia bahasa Banyumas lebih tua dibandingkan dengan bahasa Jawa yang sudah mengenal tataran *ngoko-krama* dan disebut sebagai “Bahasa Jawa Anyar berjenjang” atau “bahasa Keraton”.⁹ Bahkan melalui Kongres Bahasa Banyumasan, yang diadakan pada 2014, menghasilkan sebuah poin keputusan bahwa sebutan bahasa Banyumasan diganti istilahnya dengan sebutan bahasa “Panginyongan”.¹⁰

Menyikapi penilaian tentang bahasa Banyumasan yang disebut sebagai sebuah dialek atau logat saja. Maka seorang akademisi, yaitu Prof. Sugeng Priyadi, mengatakan bahwa bahasa Banyumasan sebagaimana penelitian yang

⁵ Baryadi I. Praptomo, ed., *Tata Bahasa Jawa Mutakhir* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 13.

⁶ Baryadi I. Praptomo, *Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), 28.

⁷ James Siegel, “Berbahasa,” dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. oleh Henri Chambert-Loir (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 342.

⁸ Pengantar Kamus Banyumas – Indonesia dengan judul “Prelune nguri-uri basa Panginyongan”. Ahmad Tohari, *Kamus Dialek Bahasa Banyumas-Bahasa Indonesia* (Purwokerto: Yayasan Carablaka, 2014).

⁹ Tohari, “Jejak Tradisi Jawa Kuna Dalam Kebudayaan Jawa Banyumasan,” 139–41.

¹⁰ Tohari, 141.

dilakukan oleh Esser pada 1927–1929 tergolong sebagai bahasa yang umurnya lebih tua dari bahasa Jawa Baku.¹¹ Hal senada dikatakan oleh Budiono Herusatoto bahwa “ngapak-ngapak” jika dilihat dari sejarah perkembangan kebahasaan Jawa sebenarnya adalah “bahasa Jawa Asli”.¹² Dengan pendapat-pendapat di atas, sebenarnya sedang dikatakan bahwa bahasa Banyumasan bukan hanya sebuah dialek atau logat saja, akan tetapi adalah benar-benar sebuah bahasa.

Namun hingga saat ini, khususnya di gereja GKJ di wilayah Banyumasan, bahasa Banyumasan atau Panginyongan belum digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam ibadah gerejawi. Demikian juga Alkitab bahasa Banyumasan yang saat ini sudah ada juga belum dipakai sebagai bacaan dalam liturgi ibadah di GKJ di wilayah Banyumasan.

Mengapa bahasa Banyumasan belum dipakai dalam ibadah gerejawi di gereja GKJ di daerah atau wilayah masyarakat yang berbahasa Banyumasan atau Panginyongan? Apakah dengan penerjemahan Alkitab Banyumasan dapat menjadi sarana *Counter Hegemoni*? Bagaimana melakukan *Counter Hegemoni* melalui penerjemahan Alkitab Banyumasan?

Metode

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode primer dan sekunder. Wawancara menjadi sumber primer dan teks-teks yang terkait menjadi sumber sekunder dalam Kajian Budaya. Pengolahan data, baik primer maupun sekunder, masuk dalam proses analisis yang menghubungkan data-data tersebut menjadi sumber kekuatan penelitian dalam ranah dan sudut pandang Kajian Budaya.

¹¹ Sugeng Priyadi, *Menuju Keemasan Banyumas* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 272.

¹² Budiono Herusatoto, *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 142. Sejarah perkembangan kebahasaan Jawa:

1. Bahasa lisan Jawa Asli (Jawadwipa – *ngoko lugu*), yang sekarang lebih populer disebut bahasa Jawa dialek Banyumasan.
2. Bahasa Jawa Kawi (*krama lugu*).
3. Bahasa Krama dialek *gandhekan*.
4. Bahasa Jawa Krama Inggil.

Sejarah Bahasa Alkitab dan Terjemahannya

Alkitab adalah Kitab Suci bagi umat Kristen yang tersusun melalui sebuah proses kanonisasi yang lama. Secara ringkas, Alkitab terdiri dari dua bagian yaitu Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB) yang semuanya terdiri dari 37 kitab. Perjanjian Lama sebenarnya adalah kitab suci orang Yahudi yang lalu “diakuisisi” oleh orang-orang sempalan dari penganut agama Yahudi, yang disebut Kristen. Sebutan Perjanjian Lama mulai disematkan pada kitab suci Ibrani ini baru pada akhir abad ke-2, mengacu pada salah satu kalimat surat Paulus kepada jemaat di Korintus.¹³ Di dalam Perjanjian Lama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani dan Aram yang menjadi bahasa pengantar bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan Perjanjian Baru yang ditulis pada zaman kekuasaan kekaisaran Romawi, ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani (Koine) yang pada waktu itu menjadi bahasa pengantar (*lingua franca*) di wilayah kekaisaran Romawi yang meneruskan kekuasaan Alexander Agung.¹⁴

Penerjemahan kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani bertujuan bagi orang-orang Yahudi diaspora yang tidak fasih berbahasa Ibrani.¹⁵ Pada masa Raja Ptolomeus II (283–246 SM), diperintahkan untuk penerjemahan kitab agama Yahudi ini ke dalam bahasa Yunani dengan tujuan untuk meng-“Hellenis”-kan orang-orang Yahudi diaspora melalui kitab suci terjemahan Yunani ini. Terjemahan ini dikenal dengan sebutan Septuaginta (LXX). Selanjutnya, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin dikerjakan oleh Hieronymus atas perintah Paus, di mana penerjemahan ini harus dikerjakan berdasarkan teks aslinya, yang nantinya disebut Vulgata, yang digunakan secara resmi di gereja hingga kurang lebih 1000 tahun lamanya.¹⁶ Penerjemahan ini dilakukan atas usul Kaisar Roma yang dipengaruhi oleh Edik Milano (313), Edik Gratianus (380), dan pemisahan administrasi antara Romawi Barat dan Timur (395).¹⁷ Penerjemahan Alkitab ini bertujuan supaya hanya ada satu model terjemahan resmi yang diakui gereja sehingga dapat menghindari munculnya terjemahan-terjemahan lainnya. Dengan adanya satu model penerjemahan ini

¹³ Robert B. Coote dan Mary P. Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 13.

¹⁴ Coote dan Coote, 110–24.

¹⁵ Coote dan Coote, 113.

¹⁶ Daud H. Soesilo, *Mengenal Alkitab Anda* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1995), 26–27.

¹⁷ Coote dan Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, 182, 195, 200.

saja maka diharapkan arah penafsiran dan pandangan teologis yang diambil dari Alkitab adalah menjadi otoritas penuh dari pihak gereja.

Masalah dan ketegangan penerjemahan Alkitab tidak hanya berhenti pada bahasa Yunani dan Latin saja. Namun juga berkembang ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia, dan masih dilakukan hingga sekarang ini. Masalah dan ketegangan muncul dari Tyndale yang merasa bahwa penerjemahan Alkitab harus berdasarkan *eksegesis* atau tafsiran si penerjemah. Pada 1526, dia melakukan penerjemahan Alkitab sekaligus menghasilkan tafsiran serta pandangan teologis yang berbeda dengan otoritas gereja. Dari permasalahan tersebutlah, maka Tyndale dijatuhi hukuman penjara oleh gereja, dan setelah itu dihukum mati dengan dibakar secara hidup-hidup.¹⁸ Selain peristiwa yang dialami oleh Tyndale, terdapat dua peristiwa penting yang sangat memengaruhi perkembangan penerjemahan Alkitab. Pertama, penemuan mesin cetak yang sering disebut sebagai Revolusi Gutenberg; kedua, Reformasi Gereja (1517) yang digagas oleh Martin Luther.¹⁹

Munculnya gerakan Reformasi Gereja dilatarbelakangi adanya penyelewengan-penyelewengan terhadap surat pengakuan dosa yang diterbitkan oleh otoritas gereja Roma pada waktu itu. Inilah yang membuat Martin Luther mempunyai banyak gagasan terhadap gerakan reformasi gereja. Salah satunya adalah ketika dia merasa bahwa satu-satunya kewibawaan Firman Tuhan adalah melalui Alkitab. Prinsipnya, Alkitab harus bisa dimengerti oleh semua orang percaya. Supaya isi Firman Tuhan di dalam Alkitab dapat dimengerti oleh semua orang percaya, maka sebaiknya isi Firman Tuhan ini dapat disampaikan menggunakan bahasa lokal sehingga lebih mudah diterima oleh jemaat. Pandangan inilah yang menggerakkan Martin Luther untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman yang secara komplit terbit pada 1534.

Kemunculan Alkitab dalam bahasa Jerman juga didukung adanya penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad sebelumnya yang disebut sebagai “Revolusi Gutenberg”. Mesin cetak inilah yang membuat Alkitab bahasa Jerman ini menjadi lebih mudah diperbanyak, sehingga dalam waktu singkat Alkitab ini sudah bisa beredar di seantero Jerman. Dengan ketersediaan yang banyak dan cepat dari Alkitab bahasa Jerman ini, maka jemaat gereja Jerman pada waktu itu tidak hanya bisa mendengarkan isi dari terjemahan itu saja, akan tetapi juga bisa membacanya bahkan memiliki Alkitab itu. Inilah yang memunculkan sebuah semboyan dari kaum Reformasi yaitu “Sola Scriptura”,

¹⁸ Soesilo, *Mengenal Alkitab Anda*, 27.

¹⁹ Soesilo, 27.

didukung oleh Raja Prusia yaitu Raja Frederick yang menentang otoritas Gereja Roma yang dipandang terlalu mengatur urusan kerajaan.²⁰

Reformasi gereja tidak hanya terjadi di Jerman saja, juga meluas ke seluruh Eropa bahkan masuk ke daratan Inggris. Dengan semangat yang sama, atas perintah Raja James diterjemahkanlah Alkitab ke dalam bahasa Inggris pada 1611. Terjemahan ini terkenal dengan sebutan King James Version (KJ-V).²¹ Penerjemahan Alkitab akhirnya menjadi salah satu cara gereja Protestan untuk melakukan reformasi gereja. Dengan semakin menjalarnya proses penerjemahan ke dalam bahasa lokal pada abad ke-19, mulai muncul lembaga-lembaga Alkitab yang secara khusus mengurus penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal atau bahasa ibu.

Gerakan terjemahan sejak VOC

Dengan banyaknya lembaga-lembaga Alkitab yang didirikan diberbagai negara, pada 1946 lembaga alkitab dari berbagai negara menyepakati untuk berkumpul bersama dan membentuk Lembaga Alkitab Sedunia (United Bible Societies, UBS). Dengan adanya Lembaga Alkitab Sedunia, metode yang sebelumnya lebih banyak menekankan metode harfiah, memasuki era yang lebih komunikatif.

Pada era ini mulai dipergunakan metode dinamis atau fungsional yang dipopulerkan oleh Dr. Eugene Nida. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa keberadaan Alkitab, melalui proses penerjemahan, dapat dihasilkan karena adanya tuntutan sebuah legitimasi yang diikuti adanya pergantian kekuasaan.²² Bisa dikatakan bahwa proses penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa juga diikuti adanya sebuah relasi kekuasaan.

Perkembangan penerjemahan Alkitab di Indonesia terkait dengan sejarah hadirnya kekristenan di bumi Nusantara. Menurut catatan sejarah, di wilayah Nusantara pada abad ke-7 M sudah terdapat sebuah komunitas Kristen Nestorian di daerah Barus, Sumatera Utara. Komunitas ini tidak membawa pengaruh yang besar di daerah Sumatera, karena pada saat itu kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha sedang mengalami masa keemasannya, sehingga kekristenan di Sumatera akhirnya bisa dikatakan “layu sebelum berkembang”. Baru pada era masuknya bangsa Barat, khususnya bangsa Be-

²⁰ W. J. Kooiman, *Martin Luther: Doktor dalam Kitab Suci, Reformator Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 44–52.

²¹ Soesilo, *Mengenal Alkitab Anda*, 27–28.

²² Coote dan Coote, *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*, 211.

landa, melalui serikat dagang VOC, kekristenan memperlihatkan jejak-jejak yang jelas, salah satunya melalui penerjemahan Alkitab.

Menurut Louren de Vries dari perspektif “skopos”, sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia dipilah menjadi tiga periode: periode pertama tahun 1629–1811 (dari VOC hingga kedatangan Raffles), periode kedua tahun 1811–1950 (periode Raffles hingga pembentukan LAI), periode ketiga tahun 1950–sekarang (periode perintisan dan kinerja LAI).²³

Periode pertama, penerjemahan Alkitab dalam bahasa Portugis dan Melayu di Nusantara dilakukan oleh serikat dagang Belanda (VOC). Panitia penerjemahan Alkitab serta Dewan Gereja dari Gereja Reformasi Batavia (Gereja Protestan Calvinis) menjadi penyelia yang memberi persetujuan.²⁴ Tujuan atau *skopos* dari terjemahan Alkitab ini adalah sebuah terjemahan gerejawi yang digunakan untuk melayani jemaat-jemaat Eurasia (Indo-Belanda) etnis Ambon, Tionghoa, dan Jawa, serta digunakan untuk kepentingan pendidikan atau sekolah.²⁵ Dapat dikatakan bahwa Alkitab bahasa Portugis dan Melayu yang diterbitkan oleh VOC adalah Alkitab yang digunakan untuk kebutuhan gerejawi dan sekolah. Untuk terjemahan bahasa Melayu, Leijdecker mulai menerjemahkan sesuai dengan bahasa Melayu yang mengacu pada bahasa-bahasa sastra dari istana Melayu. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Melayu ini diterjemahkan dalam bahasa “Melayu Tinggi”. Melalui perintah ini, VOC sedang mengubah *skopos* penerjemahan: yang sebelumnya ditujukan sebagai Alkitab gerejawi dan sekolah, menjadi semacam “Alkitab sastra”.

Periode kedua dimulai sejak kedatangan Inggris di Nusantara. Proses penerjemahan Alkitab yang disponsori dan didanai oleh VOC terpaksa dihentikan seiring bangkrutnya VOC. Ternyata proyek penerjemahan Alkitab ini menarik perhatian Raffles untuk melanjutkannya dengan mengajak Lembaga Alkitab Inggris (BFBS, British and Foreign Bible Society). Mereka datang ke Nusantara untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jawa. Untuk membantu BFBS, Raffles mendirikan Lembaga Alkitab Jawa, yang nantinya pada tahun 1816 setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Nusantara, lembaga ini berubah nama menjadi “Oost-

²³ Coote dan Coote, 461–62.

²⁴ Coote dan Coote, 461.

²⁵ Coote dan Coote, 466–67.

Indish Bijbelgenootschap” (Lembaga Alkitab Hindia Belanda) atau juga disebut sebagai “Bataviaas Bijbelgebootschap”.²⁶

Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada 1816, wilayah Nusantara kembali diserahkan kepada Belanda. Kehadiran kembali bangsa Belanda ke Nusantara diikuti dengan kedatangan Lembaga Alkitab Belanda (NBS/NBG). Lembaga ini beranggotakan sejumlah elite politik, budaya, dan sosial, baik dari negeri Belanda maupun orang-orang Belanda yang sudah menetap di Hindia Belanda.²⁷ Lembaga Alkitab inilah yang banyak berperan dalam revisi Alkitab bahasa Melayu dan penerjemahan Alkitab dalam berbagai macam bahasa daerah di Nusantara. Khususnya pada revisi terjemahan Alkitab bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah Hindia Belanda.²⁸

Terjemahan Bahasa Melayu – terjemahan persatuan

Selain lembaga Alkitab Inggris dan Belanda, diikuti juga lembaga alkitab dari Skotlandia. Beberapa lembaga Alkitab tersebut di satu sisi terjalin kerja sama di antara mereka, di sisi lain terjadi pertentangan di antara mereka. Dalam masa inilah terjadi beberapa kali revisi terhadap Alkitab bahasa Melayu. Revisi ini tidak hanya dilakukan di wilayah Nusantara saja, namun juga di wilayah semenanjung Malaya dan Singapura. Revisi-revisi yang terjadi: revisi terjemahan Leijdecker, Alkitab terjemahan Klinkert (1879), Shellabear (1927–1929) dan PB terjemahan Bode (1938).²⁹ Melalui revisi-revisi terjemahan ini, diharapkan mampu mengkonstruksi sebuah bahasa Melayu standar yang disebut sebagai “**terjemahan persatuan**”.³⁰

Selain merevisi terjemahan bahasa Melayu, pada periode dimulai juga penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Antara lain bahasa Jawa (1854), Sunda (1877), Batak Toba (1878), Bugis (1888), dan bahasa daerah lainnya. Alkitab dalam bahasa daerah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gereja-gereja baru bernuansa kedaerahan yang bermunculan di wilayah Hindia Belanda. Penerjemahan ini

²⁶ Coote dan Coote, 462.

²⁷ Coote dan Coote, 464.

²⁸ Coote dan Coote, 462.

²⁹ Soesilo, *Mengenal Alkitab Anda*, 49–58.

³⁰ Weinata Sairin, ed., *Persebaran Firman di Sepanjang Jaman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 48.

dilakukan oleh beberapa lembaga Alkitab, antara lain Lembaga Alkitab Inggris yang masuk pada zaman Raffles dan Lembaga Alkitab Belanda (NBS).

Menurut Vries, ada tiga bahasa daerah yang terdapat kasus-kasus penting untuk dibahas yaitu, bahasa Jawa, Batak, dan Simalungun.³¹ **Bahasa Jawa** adalah bahasa daerah pertama kali yang diterjemahkan oleh lembaga alkitab; **bahasa Batak (Toba)**, sebelum dilakukan proses penerjemahan Alkitab harus melalui proses penelitian linguistik secara mendalam terlebih dahulu; **bahasa Simalungun** adalah bahasa daerah yang diterjemahkan secara independen, menjadi masa peralihan untuk periode selanjutnya.

Penerjemahan bahasa Jawa pertama kali dilakukan oleh Bruckner. Tetapi, terjadilah penyitaan Alkitab Bahasa Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda (1831) karena dianggap bisa mengancam “keamanan dan ketertiban” di Pulau Jawa. Waktu itu baru saja terjadi Perang Jawa, sehingga dikhawatirkan bisa membangkitkan api perlawanan pengikut Pangeran Diponegoro yang beragama Islam. Ini adalah salah satu cara pembatasan politik yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda kepada semua badan misi, lembaga Alkitab, gereja, dan setiap individu, baik pendeta maupun jemaat awam. Tujuannya adalah untuk tidak melakukan penginjilan. Semua yang berbau religius berada di bawah pengawasan penuh pemerintah Hindia Belanda, terutama penginjilan. Jika penginjilan bisa membawa dampak positif serta membawa keuntungan bagi Hindia Belanda, maka hal tersebut bisa dilakukan meskipun harus dengan pengawasan sangat ketat, termasuk dalam penerjemahan Alkitab.

Walaupun pemerintah Hindia Belanda menyita Alkitab Jawa terjemahan Bruckner, Lembaga Alkitab Belanda menginginkan adanya terjemahan Alkitab dalam bahasa Jawa. Pada 1827, Gericke dutus oleh Lembaga Alkitab Belanda ke Pulau Jawa untuk menerjemahkan Alkitab serta untuk memberi perhatian pada bahasa sakral dalam bahasa Jawa Kawi untuk membandingkannya dengan bahasa Jawa yang saat itu digunakan (*ngoko-krama*). Hal ini bertujuan agar penelitian dapat menunjang proses penerjemahan Alkitab bahasa Jawa sesuai dengan Naskah Suci, namun juga dapat dipahami oleh orang-orang Jawa. Terjemahan ini selesai pada 1854.

³¹ Henri Chambert-Loir, ed., *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 471.

Alkitab bahasa Jawa terjemahan Gericke digunakan pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Keraton untuk membakukan bahasa Jawa. Pada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jawa, sebenarnya terkandung maksud kepentingan pemerintahan kolonial tentang pemakaian bahasa Jawa melalui proses “konstruksi bahasa” yang memunculkan sebuah “standarisasi” bahasa Jawa.

Selanjutnya, terjemahan Alkitab dari P. Janz yang sangat mencintai budaya Jawa. Kecintaannya terhadap budaya Jawa dimulai dengan mempelajari sastra Jawa. Dia menyelidiki Alkitab bahasa Jawa terjemahan Gericke serta menerjemahkan Alkitab sekaligus mengkritik Alkitab terjemahan Gericke ini. Terjemahan Gericke dinilai sangat kaku dan kurang jelas, sangat mengikuti alur tata bahasa Jawa “Keraton” yang sangat formal. Memang, terjemahan Gericke banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa *krama* ketimbang *ngoko*. Menurutnya, lebih baik menerjemahkan Alkitab dengan mengesampingkan tata bahasa yang terikat pada makna yang harfiah dan lebih mengedepankan terjemahan yang dapat dipahami semua orang, sekaligus jelas dan tepat. P. Janz mulai “menjawabkan” Alkitab dengan memakai bahasa Jawa sehari-hari, diterbitkan pada 1895.

Ketika sudah menjadi negara yang merdeka dengan nama Indonesia, segala sesuatu yang “berbau” Belanda sedikit demi sedikit dihilangkan. Salah satunya adalah gagasan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia menggantikan *lingua franca* di wilayah nusantara pada era kolonial, yaitu bahasa Melayu. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sudah didengungkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Saat pemerintahan kolonial masih bercokol, bahasa Indonesia sudah mulai digunakan sebagai sebuah bahasa perlawanan. Penggunaan bahasa Indonesia dipakai sebagai alat pemersatu yang berdiri di atas perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Demi rasa persatuan, disusunlah sebuah *lingua franca* baru, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai sebuah *lingua franca*, bahasa Indonesia menyerap lema dari banyak bahasa: bahasa Portugis, Belanda, Inggris, Arab, India, Melayu, Jawa, dan lain-lain.

Periode ketiga, 1950 diawali dengan bersatunya 32 denominasi gereja Protestan di Indonesia dengan membentuk DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia), yang saat ini menjadi PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia).³² Pembentukan DGI diikuti pembentukan LAI (Lembaga

³² Chambert-Loir, 462.

Alkitab Indonesia) pada 1954 sebagai sarana menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa nasional untuk menggantikan Alkitab bahasa Melayu.³³

Ketika Orde Lama (era Presiden Soekarno) beralih menjadi Orde Baru (era Presiden Soeharto), hal yang berbau “Soekarno” harus dihapus. Ini berpengaruh terhadap keberadaan Alkitab TL (Terjemahan Lama) yang disesuaikan dengan Ejaan Yang Baru (EYD). Pada periode ini diperkenalkan metode penerjemahan dinamis/fungsional yang mementingkan arti dan fungsi. Dimaksudkan naskah asli Alkitab dalam bentuk bahasa sasaran yang umum dan wajar, sesuai pemakaian kekinian, dimengerti semua lapisan. Model Alkitab yang menggunakan metode tersebut adalah “Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari” (BIS). Penerjemahan ini dimulai 1974 dan diterbitkan pada 1985. Alkitab BIS adalah terjemahan fungsi eksternal bertujuan *skopos* untuk kepentingan pembaca yang tidak akrab dengan bahasa gerejawi.³⁴

Selain menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, LAI juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah (suku) di Indonesia sudah dimulai sejak awal abad ke-19 ketika Lembaga-lembaga Alkitab masuk ke bumi Nusantara. Ternyata, bahasa daerah mengalami perkembangan. Sebagai contoh, Alkitab bahasa Batak yang diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Toba ternyata memancing reaksi dari orang-orang Kristen di daerah Simalungun yang menuntut adanya terjemahan Alkitab bahasa Simalungun. Alkitab bahasa Simalungun ini baru bisa selesai diterjemahkan dengan bantuan LAI pada akhir tahun 1960-an.

Penerjemahan Alkitab Banyumasan

Pada tahun 2005 telah dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Banyumasan. Proses penerjemahan ini tidak dilakukan oleh LAI, namun oleh sebuah “komunitas budaya” PASEBAN (Paguyuban Senthir Banyumasan) secara mandiri bekerja sama dengan Yayasan Kartidaya. Pada 2015, penerjemahan telah menyelesaikan Injil Lukas. Disusul selesainya terjemahan Kisah Para Rasul pada tahun 2019. Penerjemahan mandiri Alkitab bahasa Pangi-nyongan dilakukan karena adanya hegemoni bahasa antara bahasa Jawa Baku

³³ Sairin, *Persebaran Firman di Sepanjang Jaman*, 51.

³⁴ Chambert-Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, 460.

dengan bahasa Panginyongan, yang terjadi juga khususnya di gereja GKJ di wilayah Banyumasan.

Hegemoni

Gagasan Hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh Plekhanov, seorang Marxis Rusia.³⁵ Hegemoni adalah sistem perbudakan yang dilakukan oleh para tuan tanah kepada para petani. Di era kapitalisme, hegemoni terjadi pada perbudakan kelas pekerja yang dilakukan oleh kelas pemilik modal.³⁶ Hal ini yang memunculkan konsep dasar kelas pekerja membangun aliansi bersama kelas petani dengan tujuan menggulingkan kekaisaran Tsar.³⁷ Konsep ini diterapkan oleh Lenin yang melahirkan “Revolusi 1917” di Rusia. Selanjutnya konsep ini dikembangkan Antonio Gramsci di Italia, di mana Hegemoni adalah “sentral”³⁸ dan “puncak”³⁹ pemikiran serta gagasan yang paling “orisinil”⁴⁰ dalam filsafat serta teori sosialnya. Hegemoni menurut Gramsci adalah suatu sistem relasi kekuasaan yang bukan hanya sekadar berdasarkan sebuah “dominasi”, akan tetapi berdasarkan kepemimpinan *intelektual* dan *moral*.⁴¹

Hegemoni Bahasa

Gramsci secara spesifik tidak menjelaskan tentang hegemoni bahasa. Hegemoni bahasa terjadi bukan melalui jalur *coersif* akan tetapi melalui jalur *consent*. Konsep hegemoni bahasa Gramsci, menurut Steve Jones, dapat juga dilihat melalui teori “kekerasan simbolik” Bourdieu.⁴²

³⁵ Robert Bocock, *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*, trans. oleh Ikramullah Mahyuddin (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 22.

³⁶ G. V. Plekhanov, “Masalah-masalah Dasar Marxisme,” trans. oleh Ira Iramanto (2007), 29.

³⁷ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, trans. oleh Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar, 2004), 20.

³⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goldman, *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*, trans. oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 100.

³⁹ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*, trans. oleh Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2008), 2..

⁴⁰ Bocock, *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*, 15.

⁴¹ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, trans. oleh Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63, 81.

⁴² Steve Jones, *Antonio Gramsci* (London: Routledge, 2006), 52.

Kekerasan simbolik bahasa adalah relasi kuasa bahasa dengan unsur “kekerasan” yang tidak nampak secara jelas, namun dapat dirasakan. Hegemoni bahasa yang dilakukan melalui bahasa Latin (Gramsci) serta bahasa Inggris (Bourdieu) terjadi karena bahasa telah distandarkan atau dibakukan. Bahasa yang dibakukan atau bahasa baku adalah sebuah ragam bahasa yang melewati proses kodifikasi, yaitu tahap pembakuan tata bahasa, ejaan, dan kosakata, yang secara politis berfungsi sebagai bahasa resmi.⁴³ Hal ini terjadi pada bahasa Jawa Baku dengan bahasa Panginyongan di wilayah Banyumasan. Bahasa Panginyongan dianggap sebagai bahasa “kelas dua” setelah bahasa Jawa Baku.

Fenomena ini, menurut Praptomo Baryadi, adalah bagian dari sebuah “diskriminasi bahasa”.⁴⁴ Diskriminasi bahasa, menurut Prof. Sugeng Priyadi, menyebabkan dialek atau logat di luar Jogja-Solo menjadi “bahasa kelas dua”.⁴⁵ Sementara budayawan Ahmad Tohari menyikapi fenomena ini dengan mengatakan bahwa dialek atau logat Banyumas yang sering disebut sebagai “ngapak-ngapak” adalah sebuah “bahasa” dan bukan hanya sekadar dialek atau logat; bahasa ini disebut sebagai bahasa Panginyongan.⁴⁶ Teguh Trianton mengatakan bahwa bahasa Banyumas atau “ngapak-ngapak” adalah sebagai bahasa Jawa murni (*pure Javanese Language*), yang disebut sebagai bahasa Jawadipa (*ngoko lugu*).⁴⁷ Hal senada juga dikatakan oleh Budiono Herusatoto, yang mengatakan bahwa bahasa Jawadipa adalah bahasa Jawa asli.⁴⁸

Ben Anderson dan John Pemberton telah melihat adanya konstruksi bahasa di dalam bahasa Jawa yang memunculkan standarisasi bahasa Jawa melalui logat Jogja-Solo sebagai bahasa Jawa Baku. Standarisasi bahasa Jawa Baku sudah terjadi sejak masa kerajaan Mataram Islam. Penghapusan tingkatan kasta sosial digantikan dengan tingkatan bahasa Jawa dalam bentuk *ngoko* dan *krama*. Kasta sosial dihilangkan, namun kasta bahasa dimunculkan.

⁴³ Kusharyati dan Untung Yowono, *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 61.

⁴⁴ Praptomo, *Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan*, 28..

⁴⁵ Sugeng Priyadi, *Banyumas: Antara Jawa dan Sunda* (Semarang: Mimbar, 2002), 267.

⁴⁶ Tohari, “Jejak Tradisi Jawa Kuna Dalam Kebudayaan Jawa Banyumasan,” 139–44.

⁴⁷ Teguh Trianton, *Identitas Wong Banyumas* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 14.

⁴⁸ Herusatoto, *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak*, 160–61.

Kerajaan Mataram Islam adalah sebuah dinasti yang muncul setelah keruntuhan kerajaan Mataram Kuno yang bercorak Hindu-Buddha. Saat ini, dinasti Mataram Islam sudah terbagi menjadi 4 kerajaan, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran di Kota Solo serta Kasultanan dan Pakualaman di Kota Yogyakarta. Perpecahan tersebut banyak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kolonialisme Barat (Belanda dan Inggris) yang menganut paham *divide et impera*. Perpecahan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa sudah tidak ada, dikarenakan kerajaan-kerajaan ini telah dikuasai oleh bangsa Barat, yaitu Belanda dan Inggris (karena kekuasaan bangsa Belanda lebih lama dibandingkan Inggris, maka bangsa barat yang dimaksud adalah Belanda). Praktik kolonialisme bangsa Barat terhadap kerajaan-kerajaan Jawa menunjukkan kekuasaan raja-raja Jawa terhadap rakyatnya hanya menjadi simbol semata, karena secara keseluruhan kerajaan Jawa telah dikuasai serta tunduk kepada Belanda.

Bagi Belanda, konsep kuasa yang dipakai adalah konsep kuasa Barat (Eropa) yang modern atau kontemporer. Konsep kekuasaan Barat kontemporer dapat dilihat melalui tokoh atau pemikir seperti Marx dengan teori “basis dan suprastruktur”, Gramsci dengan teori “hegemoni”, Bourdieu dengan teori “kekerasan simbolik”, dan lain sebagainya. Ben Anderson mendefinisikan konsep Barat kontemporer tentang kekuasaan adalah “*suatu abstraksi yang dideduksikan dari pola-pola interaksi sosial yang teramati; kekuasaan dipercaya sebagai sesuatu yang diturunkan dari berbagai macam sumber; kekuasaan sama sekali bukanlah sesuatu yang membatasi dirinya sendiri; dan secara moral ambigu*”.⁴⁹ Konsep kekuasaan Jawa tidaklah demikian. Ben Anderson melihat bahwa orang Jawa memandang kekuasaan sebagai “*sesuatu yang nyata, homogen, jumlah keseluruhannya tetap, dan tanpa implikasi moral yang inheren*”.⁵⁰

Sangat jelas bahwa faktor kuasa sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa Jawa, khususnya bahasa *ngoko-krama*. Bahasa menunjukkan bagaimana rakyat hormat kepada raja, dan raja hormat kepada Belanda. Pihak Belanda-lah yang diuntungkan, Belanda berada pada puncak hierarki bahasa *ngoko-krama*. Demikian pula, raja-raja Jawa yang ditaklukkan oleh Belanda juga mendapatkan keuntungan dari bahasa *ngoko-krama* ini. Kedudukan mereka sebagai raja tetap dihormati oleh rakyat melalui praktik berbahasa seperti ini. Bahasa *ngoko-krama* menjadi sarana bagi penguasa untuk berkuasa. Be-

⁴⁹ Anderson, *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, 46.

⁵⁰ Anderson, 49.

landa berkuasa terhadap para raja dan rakyat Jawa, sedangkan para raja Jawa juga tetap dapat memiliki kekuasaan terhadap rakyat.

Pada permulaan abad ke-20, sebuah kelompok yang diprakarsai oleh Tjokro Soedarmo (pemimpin Sarekat Islam di Surabaya), yaitu “Djawa Dipa” (berdiri 1918), menolak penggunaan bahasa *krama*, dan lebih memilih berbahasa *ngoko* kepada semua orang, tidak terkecuali pada orang-orang Belanda. Menurut mereka, bahasa asli orang Jawa adalah bahasa *ngoko*.⁵¹ Penentangan terhadap bahasa *krama* juga ditunjukkan oleh para pengikut gerakan Samin yang bermukim di Pegunungan Kendeng Utara (daerah Blora dan sekitarnya), yang menolak memakai bahasa *krama* dan tetap memilih menggunakan bahasa *ngoko* ketika berkomunikasi dengan siapapun.⁵²

Apa yang dirasakan oleh orang-orang Samin juga dirasakan oleh orang-orang yang bermukim di daerah Banyumasan. Mereka mempunyai bahasa percakapan sehari-hari yang khas dan tidak mengenal tataran bahasa *ngoko-krama*.⁵³ Ahmad Tohari, di dalam Kongres Bahasa Banyumasan yang diadakan pada 2016, memperjuangkan status kebahasaan bahasa Banyumas sebagai sebuah bahasa. Bahasa Banyumasan diganti istilahnya dengan sebutan bahasa “Panginyongan”.⁵⁴

Hegemoni bahasa Jawa Baku juga terlihat di novel *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari. Baik versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Banyumasan atau Panginyongan masih mengandung kata-kata yang menggunakan bahasa Jawa *krama*. Ketika novel tersebut diangkat ke layar lebar dengan judul *Sang Penari*, juga masih memperlihatkan beberapa adegan yang menggunakan bahasa Jawa *krama*. Ini menunjukkan adanya hegemoni bahasa Jawa Baku terhadap bahasa Panginyongan. Hal demikian juga terjadi pada proses penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan yang dilakukan oleh PASEBAN, di mana terjemahan Alkitab tersebut belum bisa diterima secara penuh oleh gereja, khususnya oleh gereja GKJ. Melalui penelitian yang dilakukan, sebenarnya lebih banyak responden yang menginginkan digunakannya Alkitab bahasa Panginyongan di gereja. Dengan demikian, bahasa Pangi-

⁵¹ Anderson, 456–58.

⁵² Anderson, 454–55.

⁵³ Pengantar Kamus Banyumas – Indonesia dengan judul “Prelune nguri-uri basa Panginyongan”. Dalam Tohari, *Kamus Dialek Bahasa Banyumas-Bahasa Indonesia*.

⁵⁴ Tohari, “Jejak Tradisi Jawa Kuna Dalam Kebudayaan Jawa Banyumasan,” 139–44.

nyongan sebenarnya dapat digunakan sebagai bahasa resmi gerejawi di gereja GKJ di wilayah Banyumasan.

Dari penelitian diketemukan bahwa terdapat dua alasan besar yang menjadi faktor utama belum digunakannya Alkitab bahasa Panginyongan di gereja GKJ di wilayah Banyumasan, yaitu faktor “rasa” dan “pengakuan”. Dari faktor “rasa”, bahasa Panginyongan masih dianggap sebagai bahasa kasar, sedangkan bahasa Jawa Baku dianggap sebagai bahasa yang halus serta adiluhung. Dari faktor “pengakuan”, bahasa Panginyongan tidak diakui sebagai bahasa resmi gerejawi, salah satunya karena Alkitab yang selama ini digunakan oleh GKJ adalah Alkitab terjemahan bahasa Jawa (Baku).

Proses ini mengarah kepada “kramanisasi” bahasa di mana bahasa *krama* menjadi bahasa “kelas satu”, sedangkan bahasa *ngoko* menjadi bahasa “kelas dua”. Konstruksi ini berkembang menjadi sebuah relasi kuasa di mana satu bahasa menghegemoni bahasa lainnya. Dalam “kramanisasi”, bahasa Jawa Baku ditempatkan sebagai bahasa yang penuh dengan “kuasa kata” dan “bahasa kosong”.

Pada masa Orde Baru, banyak kata dalam bahasa Jawa “dinasionalkan” menjadi bahasa publik. Bahasa ini mempunyai kekuatan bagi penguasa. Kekuatan bahasa menjadi salah satu bentuk “kuasa kata”.⁵⁵ Kekuatan bahasa dikendalikan oleh penguasa untuk menegakkan kekosongan mengerikan, yang pada intinya tanpa makna dan menjadi sebuah “bahasa kosong”. Menurut Shiraishi, kebenaran di balik “bahasa kosong” inilah yang melarang anak untuk menentang bapak, dan sebaliknya memperbolehkan bapak bilang, “Begitulah!”⁵⁶

Kemunculan bahasa Jawa Baku melalui proses “kramanisasi” melahirkan tingkatan bahasa *krama* dan *ngoko*. Penggunaan bahasa bukan lagi hanya sekadar sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga digunakan sebagai bahasa politik bagi kepentingan penguasa. Salah satu kepentingan dari penguasa adalah menunjukkan sisi penaklukan terhadap suatu wilayah di mana penggunaan bahasa dibakukan oleh penguasa. Model penaklukan melalui bahasa adalah penaklukan yang dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik.

⁵⁵ Anderson, *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, 56.

⁵⁶ S. Shiraishi, *Pahlawan-pahlawan belia: keluarga Indonesia dalam politik* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), 194.

Counter Hegemoni

Kekuasaan seperti inilah yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni. Terjadi karena adanya kepemimpinan intelektual dan moral, hegemoni menyebabkan orang-orang Banyumas mengalami konstruksi intelektual dan moral yang dilakukan oleh penguasa melalui relasi bahasa. Untuk menghadapi hegemoni, Gramsci menawarkan teori *counter* hegemoni atau hegemoni tandingan.⁵⁷ *Counter* hegemoni membutuhkan kaum intelektual organik sebagai unsur pemikir dan pengorganisasian dari kelas yang terhegemoni.⁵⁸ Kaum intelektual organik, yang terbentuk dalam rangka perjuangan kelas, dimulai dengan pemikiran kritis sehingga muncul sebuah kesadaran serta pemahaman bersama (*collective will*).

Kaum intelektual organik tidak hanya sekadar mengikuti “*common sense*”, akan tetapi justru memunculkan gagasan “*good sense*” yang menghasilkan “perang posisi”. *Common sense* adalah tempat di mana ideologi penguasa dibangun serta dipertahankan. *Good sense* adalah inovasi progresif individu atau kelas, yang tidak hanya diam terhadap *common sense*.⁵⁹ Inovasi ini lahir dari bawah atau dari kelas yang terhegemoni. Inovasi ini melahirkan perlawanan “perang posisi” di mana perlawanan yang terjadi bukanlah melalui perlawanan fisik, akan tetapi dengan perlawanan ideologi. Dengan demikian, “perang posisi” adalah arena perang ideologis yang dibangun dari bawah.⁶⁰

Hegemoni bahasa Jawa Baku terhadap bahasa Panginyongan dapat terjadi melalui sarana lisan, teks, bahkan media elektronik. Ketika zaman telah memasuki media internet, muncul banyak konten Youtube berbahasa “ngapak-ngapak” yang kemunculannya justru bisa diterima oleh banyak kalangan. Dari sekian banyak konten tersebut, salah satu yang saat ini menjadi viral adalah konten Youtube *Bocah Ngapa(k) Ya!* Pada awalnya, konten ini tidak ditujukan untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap hegemoni bahasa Jawa Baku. Namun jika ditelusuri lebih dalam, konten ini bisa memperlihatkan bagaimana peranannya dalam melawan “kuasa kata” dan “bahasa kosong” dari “kramanisasi” bahasa Jawa Baku.

Penerjemahan Alkitab bahasa Banyumasan (Panginyongan) adalah sebuah media perlawanan terhadap hegemoni bahasa. Dalam sejarahnya, penerjemahan Alkitab digunakan untuk melawan hegemoni bahasa di dalam gereja.

⁵⁷ Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, 28.

⁵⁸ Gramsci, *Prison Notebooks*, 13.

⁵⁹ Jones, *Antonio Gramsci*, 54. 4

⁶⁰ Gramsci, *Prison Notebooks*, 45.

Alkitab Banyumasan digunakan sebagai bentuk *counter* hegemoni yang sangat relevan terjadi di gereja, khususnya di gereja GKJ di wilayah Banyumasan. Perlawanan yang dilakukan adalah dengan perlawanan “ideologis” dalam sudut pandang Kajian Budaya. Sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang teologis atau juga secara sudut pandang studi agama-agama. Dengan sudut pandang *counter* hegemoni dalam sudut pandang Kajian Budaya, perlawanan yang dilakukan benar-benar dilakukan berdasarkan kesadaran bersama yang muncul “dari bawah”.

Kesimpulan

Penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan untuk melawan hegemoni bahasa Jawa Baku, khususnya di lingkup gereja GKJ. Sebagaimana konsep *counter* hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci, paling tidak diperlukan 3 hal, yaitu pembentukan intelektual organik, *good sense*, dan perang posisi. Dalam prosesnya, penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan menunjukkan ketiga hal tersebut. Inilah yang harus dihadapi oleh para *stakeholder*, baik yang “terlibat” maupun yang “dilibatkan”, bahkan yang “melibatkan” diri dalam penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan. Strategi *counter* hegemoni dapat menjadi salah satu bagian untuk mendorong penerjemahan Alkitab bahasa Panginyongan menjadi Alkitab yang utuh serta dapat diterima secara penuh di gereja GKJ di wilayah Banyumasan, sebagaimana konsep “berbahasa” James Siegel, tanpa harus saling membawa cermin dan rasa *rikuh*.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.
- Bocock, Robert. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Diterjemahkan oleh Ikrammullah Mahyuddin. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Chambert-Loir, Henri, ed. *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malayasia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Coote, Robert B., dan Mary P. Coote. *Kuasa, Politik & Proses Pembuatan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks*. Diterjemahkan oleh Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Herusatoto, Budiono. *Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa dan Watak*. Yogyakarta: LKiS, 2008.

- Jones, Steve. *Antonio Gramsci*. London: Routledge, 2006.
- Kooiman, W. J. *Martin Luther: Doktor dalam Kitab Suci, Reformator Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Kusharyati, dan Untung Yowono. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Laclau, Ernesto, dan Chantal Mouffe. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Pos Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Diterjemahkan oleh Eko Prasetyo Darmawan. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Nuwanti, Yustina Hastrini, dkk., ed. *Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas: Masa Gandasubrata tahun 1913-1942*. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015.
- Plekhanov, G. V. "Masalah-masalah Dasar Marxisme." Diterjemahkan oleh Ira Iramanto, 2007.
- Prapto, Baryadi I. *Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012.
- , ed. *Tata Bahasa Jawa Mutakhir*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Priyadi, Sugeng. *Banyumas: Antara Jawa dan Sunda*. Semarang: Mimbar, 2002.
- . *Menuju Keemasan Banyumas*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goldman. *Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Sairin, Weinata, ed. *Persebaran Firman di Sepanjang Jaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Shiraishi, S. *Pahlawan-pahlawan belia: keluarga Indonesia dalam politik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001.
- Siegel, James. "Berbahasa." Dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malayasia*, disunting oleh Henri Chambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar, 2004.
- Soekotjo, S.H. *Sejarah Gereja-gereja Kristen Jawa (Jilid 1): Di bawah Bayang-bayang Zending 1858-1948*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2009.
- Soesilo, Daud H. *Mengenal Alkitab Anda*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1995.
- Tohari, Ahmad. "Jejak Tradisi Jawa Kuna Dalam Kebudayaan Jawa Banyumasan." Dalam *Kongres Kebudayaan Jawa II*. Surabaya: Pemprov Jawa Timur, 2018.
- . *Kamus Dialek Bahasa Banyumas-Bahasa Indonesia*. Purwokerto: Yayasan Carablaka, 2014.
- Trianton, Teguh. *Identitas Wong Banyumas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wolterbeek, J.D. *Babad Zending di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1990.